

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENGELOLAAN ASET DI TENGAH KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN

Ni Kadek Putriani¹, Ida Kade Suparta², Edy Chandra³

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram^{1,2,3}

Email; *kdkputri13@gmail.com¹, idasuparta5@gmail.com², edychandra332@gmail.com³*

Keywords:

Asset
Management,
Budget Efficiency,
KPU Strategy,
SIMAN V2,
Public Asset
Management

Abstract

This study addresses issues related to asset management at the Provincial General Election Commission (KPU) of West Nusa Tenggara, which has been affected by budget efficiency policies that influence asset maintenance, procurement, and the overall sustainability of asset functions. The purpose of this research is to explain the asset management strategies implemented by KPU NTB, identify the challenges that arise, and describe the solutions carried out to maintain effective asset management. This research uses a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that KPU NTB applies data-based planning using SIMAN V2, prioritizes essential assets, conducts routine maintenance, and strengthens both internal and external coordination to cope with budget limitations. Challenges such as budget reductions, limited human resources, and assets requiring significant repairs are addressed through adaptive strategies that help maintain the continuity and effectiveness of asset management.

Kata kunci:

Pengelolaan aset,
Efisiensi
Anggaran,
Strategi KPU,
SIMAN V2,
Manajemen Aset

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait pengelolaan aset di KPU Provinsi NTB yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran sehingga memengaruhi pemeliharaan, pengadaan, dan keberlanjutan fungsi aset. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan strategi pengelolaan aset yang diterapkan KPU NTB, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta menggambarkan solusi yang dilakukan untuk menjaga efektivitas pengelolaan aset. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU NTB menerapkan perencanaan berbasis data SIMAN V2, pemilihan prioritas aset, pemeliharaan rutin, serta koordinasi internal dan eksternal untuk menghadapi keterbatasan anggaran. Berbagai kendala seperti pengurangan anggaran, keterbatasan SDM, dan kondisi aset yang banyak memerlukan perbaikan dapat diatasi melalui strategi adaptif yang menjaga keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan aset.

Pendahuluan

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam tata kelola keuangan negara yang bertujuan untuk menjamin agar setiap aset pemerintah dapat digunakan secara optimal efisien, dan akuntabel. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, BMN tidak lagi dipandang sebatas daftar inventaris barang, melainkan sebagai sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan administrasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan BMN harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Seiring dengan perkembangan tata kelola pemerintahan yang menuntut transparansi publik, paradigma pengelolaan aset pemerintah juga mengalami perubahan signifikan. Pemerintah menggeser orientasi pengelolaan dari sekedar pencatatan administratif menuju pengelolaan aset berbasis kinerja yang berorientasi pada nilai tambah dan keberlanjutan. Perubahan paradigma ini mulai tampak sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan melalui PP Nomor 27 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan harus dilakukan secara efisien dan efektif dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi (Kementerian Keuangan, 2020)

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut membutuhkan dukungan system informasi yang mampu memastikan integrasi data aset secara nasional. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kemudian mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebagai platform resmi untuk mencatat, memantau, dan mengendalikan seluruh aktivitas pengelolaan BMN secara elektronik. Pada tahun-tahun awal implementasinya, system ini berbasis desktop dan digunakan secara terbatas. Namun, seiring dengan tuntutan modernisasi digital, DJKN memperkenalkan SIMAN Versi 2 (SIMAN V2), sebuah system berbasis web yang diresmikan implementasinya secara nasional pada tahun 2024 (Hidayat, 2024)

Siman V2 merupakan Langkah besar dalam digitalisasi manajemen aset negara. Aplikasi ini memuat berbagai modul penting sebagai perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian (Wasdal), hingga evaluasi kinerja aset. Melalui sistem ini, setiap satuan kerja pemerintah dapat melakukan pencatatan dan pembaruan data secara real-time, serta melakukan komunikasi langsung dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa harus melalui mekanisme surat-menyurat manual. Transpromasi digital ini bukan hanya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset di seluruh instansi pemerintah (Pramana, 2024)

Salah satu instansi yang turut menerapkan sistem ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai Lembaga penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bagian Umum dan Logistik KPU NTB, sistem SIMAN mulai digunakan sejak tahun 2015 dan kini telah diperbarui ke versi web (SIMAN V2) pada tahun 2024. Mulai sistem tersebut, proses pengajuan dan persetujuan terkait aset menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya, di mana setiap dokumen harus dikirim secara fisik ke KPKNL untuk diverifikasi (Wawancara Ibu Ika, 20 September 2025).

Namun, penerapan sistem pengelolaan aset yang ideal ini tidak terlepas dari tantangan eksternal yang cukup signifikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi KPU NTB pada tahun 2025 adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat. Kebijakan ini resmi dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun, 2025) Inpres tersebut menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan penggunaan anggaran negara, termasuk pada pos belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, dan kegiatan non-prioritas (Saputri et al., 2025)

Kebijakan efisiensi ini secara nasional menargetkan penghematan anggaran sekitar RP 306 triliun, yang Sebagian besar berasal dari belanja Kementerian/Lembaga serta transfer daerah. Tujuan Utama kebijakan ini adalah menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang menuntut penyesuaian fiskal (Mallongi, 2025). Meskipun memiliki tujuan yang baik, penerapan

kebijakan efisiensi ini menghadirkan tantangan besar bagi lembaga-lembaga public seperti KPU NTB yang sangat bergantung pada keberlanjutan aset dalam menjalankan tugas operasionalnya.

Kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung pada operasional aset di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bagian Umum dan Logistik, sejak awal tahun 2025 terjadi pengurangan signifikan pada alokasi biaya pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas (Wawancara Bapak Dani, 20 September 2025). Pengurangan ini menyebabkan sejumlah kegiatan pemeliharaan rutin, seperti perawatan fasilitas kantor, servis kendaraan dinas, dan pembaruan sarana logistik, harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Beberapa kegiatan pemeliharaan yang sebelumnya dilakukan secara berkala kini ditunda atau dilakukan secara mandiri oleh pegawai untuk menghemat biaya operasional.

Selain itu, kebijakan efisiensi juga memengaruhi aktivitas kerja harian di lingkungan KPU NTB. Kegiatan rapat koordinasi antar kabupaten/kota yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka kini dialihkan menjadi Zoom meeting atau pertemuan daring lainnya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi biaya perjalanan dinas, sewa tempat, konsumsi rapat, serta penggunaan kendaraan dinas yang biasanya memerlukan anggaran bahan bakar dan perawatan. Perubahan pola kerja ini tidak hanya menekan pengeluaran, tetapi juga menuntut adaptasi digital bagi para pegawai agar koordinasi dan komunikasi tetap berjalan efektif meskipun dilakukan secara jarak jauh.

Di sisi lain, efisiensi juga berimplikasi pada pembatasan pengadaan barang habis pakai dan kebutuhan operasional kantor. Beberapa kebutuhan administrasi, seperti alat tulis, kertas, dan perlengkapan logistik, diatur penggunaannya secara ketat dan diupayakan untuk dimanfaatkan secara maksimal tanpa pemborosan. Kondisi ini membuat bagian Umum dan Logistik harus melakukan perencanaan yang lebih selektif dan strategis, dengan memprioritaskan aset-aset yang dianggap vital seperti kendaraan distribusi logistik pemilu dan perangkat teknologi yang mendukung sistem informasi manajemen aset (SIMAN).

Kondisi ini menciptakan dilema yang jelas; di satu sisi, lembaga dituntut untuk menerapkan good governance aset dan menjaga fungsionalitasnya sesuai prinsip ideal PP 28/2020 dan didukung oleh SIMAN V2; namun di sisi lain, lembaga harus

berhadapan dengan keterbatasan sumber daya finansial akibat Inpres 1/2025. Inilah yang menciptakan kesenjangan kebijakan yang menjadi fokus penelitian ini. Apabila pemeliharaan aset vital seperti kendaraan logistik pemilu terhambat akibat keterbatasan anggaran, resiko kerusakan dan penurunan efisiensi aset akan meningkat drastis, yang pada akhirnya dapat mengganggu efektivitas kinerja kelembagaan dan kelancaran proses demokrasi. (Manimbaga et al., 2021)

Menghadapi situasi tersebut, KPU NTB berupaya merumuskan strategi pengelolaan aset yang bersifat adaptif. Salah satu pendekatannya adalah dengan memprioritaskan pemeliharaan pada aset-aset vital, seperti kendaraan dinas yang digunakan untuk distribusi logistik pemilu serta fasilitas utama kantor, sejalan dengan prinsip strategi efisiensi pemeliharaan aset publik (Handayani & Laksana, 2024). Selain itu, lembaga juga menerapkan pemeliharaan preventif, yaitu kegiatan perawatan aset yang dilakukan secara terencana dan berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan sebelum muncul gangguan besar terhadap operasional lembaga. Bentuk pemeliharaan ini mencakup pemeriksaan rutin, pembersihan, serta penggantian komponen yang berpotensi rusak, sehingga aset tetap dalam kondisi optimal dan biaya perbaikan mendadak dapat diminimalkan (Nurchahyo & Nurdini, 2024; Setyawan et al., 2025). Pendekatan ini mencerminkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap keterbatasan fiskal sambil tetap menjaga efektivitas operasional (Wawancara Bapak Dani, 2025).

Sejalan dengan pandangan (Benny Eko, 2024) bahwa efisiensi bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang menggunakan anggaran secara strategi untuk menciptakan dampak yang maksimal. Lebih lanjut, (Darmawan et al., 2025) menegaskan bahwa implementasi efisiensi anggaran harus diiringi upaya optimalisasi belanja, perbaikan proses, dan inovasi layanan publik agar tidak merugikan fungsi kelembagaan. Dalam konteks transformasi digital, kebijakan efisiensi juga menjadi landasan perubahan proses birokrasi agar lebih efektif, responsif dan hemat sumber daya (Jelita Silvia Hutabarat et al., 2025).

Selain itu, prinsip pengelolaan aset adaptif ini sejalan dengan penelitian kualitatif (Kuswara et al., 2022) yang menegaskan bahwa lembaga publik harus mampu mengintegrasikan pendekatan strategi dan inovatif dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran seharusnya menjadi pemicu untuk memperbaiki sistem, meningkatkan koordinasi antardivisi, serta memperluas

penggunaan teknologi informasi dalam manajemen aset. Dalam kasus KPU NTB, penggunaan SIMAN V2 menjadi salah satu contoh konkret penerapan teknologi yang memperkuat efisiensi proses tanpa harus menambah beban biaya operasional.

Konteks tersebut memperlihatkan bahwa strategi pengelolaan aset KPU NTB di Tengah kebijakan efisiensi anggaran merupakan isu yang sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini tidak hanya akan mendeskripsikan bagaimana strategi adatif diterapkan, tetapi juga menganalisis sejauh mana strategi tersebut efektif dalam menjaga keberlanjutan fungsi aset dan kinerja lembaga. Penelitian ini penting karena pengelolaan aset memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan pelaksanaan tugas utama KPU, yakni penyelenggaraan pemilu yang transparan, tertib, dan efisien. Keberhasilan lembaga dalam mengelola asetnya secara efektif akan berimplikasi pada kelancaran kegiatan demokrasi di daerah. Sebaliknya, pengelolaan aset yang tidak optimal dapat menimbulkan kendala logistik, meningkatkan resiko kehilangan aset, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Selain memberikan kontribusi praktis bagi KPU NTB, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian tentang strategi pengelolaan aset publik di bawah tekanan efisiensi anggaran. Studi ini dapat memperkaya literatur tentang implementasi prinsip good governance dalam manajemen aset sektor publik, sekaligus memberikan gambaran empiris tentang bagaimana lembaga pemerintah menyesuaikan diri terhadap kebijakan fiskal nasional yang dinamis (Cahyaningrum & Sambharakreshna, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana strategi yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat dalam mengelola aset di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sekaligus menelusuri kendala apa saja yang muncul dalam proses pengelolaan aset ketika terjadi pembatasan anggaran tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami langkah atau solusi yang dilakukan KPU NTB guna menjaga efektivitas serta keberlanjutan pengelolaan aset agar tetap optimal meskipun berada dalam situasi efisiensi anggaran.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami lebih jauh bagaimana KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat merumuskan dan menerapkan strategi pengelolaan aset secara adatif dan inovatif di Tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pada tahun 2025. Kajian ini akan menggali secara kualitatif praktik-praktik pengelolaan, prioritas

anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh bagian Umum dan Logistik dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan aset.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam strategi, kendala, dan solusi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan aset di tengah kebijakan efisiensi anggaran (Sugiyono, 2022). Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di Kantor KPU Provinsi NTB di bagian umum dan logistik. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 10 September sampai dengan 27 November 2025. Teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipan, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Observasi dengan mendapatkan gambaran objektif mengenai proses kerja harian, kondisi aset, dan interaksi yang mencerminkan dampak efisiensi anggaran, tanpa kehadiran peneliti mengubah perilaku alami para informan atau mengganggu alur kerja, dengan informan sekretaris KPU NTB, kepala bagian keuangan, umum dan logistic, kepala sub-bagian, pegawai pelaksana operator aset dan persediaan dan pegawai pelaksana Pemeliharaan, Perawatan, Gedung, Elektronik, Kendaraan, dan Distribusi Logistik. Data dokumentasi meliputi arsip atau catatan resmi instansi, laporan kegiatan, dan dokumen administratif yang mendukung proses pengelolaan aset. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan bukti visual seperti foto kegiatan di lapangan serta tangkapan layar (screenshot) dari sistem pengelolaan aset yang digunakan oleh KPU NTB. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Strategi Dalam Mengelola Aset

Terlihat hasil observasi di lapangan bahwa kegiatan pengelolaan aset di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap berjalan meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Saat pengamatan dilakukan, beberapa aset seperti kendaraan dinas, komputer, printer, lemari arsip, hingga perlengkapan kantor lainnya tampak digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Pegawai bagian umum dan logistik terlihat melakukan pengecekan rutin, membersihkan ruangan, menata dokumen, serta melakukan perbaikan ringan pada perangkat yang memungkinkan untuk diperbaiki

sendiri. Aset yang kondisinya menurun juga sudah diberi tanda untuk diusulkan penghapusan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi pengelolaan aset disusun dengan menyesuaikan kegiatan terhadap besarnya anggaran yang diterima. Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya menyampaikan bahwa rencana kerja tahunan tetap harus berjalan, namun beberapa bentuk kegiatan disesuaikan agar tidak melebihi anggaran. Ia menjelaskan, *“Rencana kerja tetap jalan, tapi ada kegiatan yang kami sesuaikan supaya bisa tetap dilaksanakan walaupun anggaran turun.”*

Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik I Gede Suantara menambahkan bahwa prioritas diarahkan pada aset yang menunjang kegiatan utama lembaga. Ia menjelaskan bahwa pencatatan inventaris dilakukan secara rutin melalui SIMAN V2, dan menurutnya, *“Pendataan di SIMAN itu rutin, supaya jelas mana yang layak dipakai dan mana yang harus dihapus.”*

Kasubbag umum dan logistik Rianda Handayani menyampaikan bahwa pemeliharaan rutin menjadi salah satu langkah utama dalam menghadapi efisiensi anggaran. Ia menyebutkan, *“Perawatan tetap kami lakukan, tapi untuk perbaikan besar biasanya ditunda dulu sampai anggarannya memungkinkan.”* Koordinasi dengan KPKNL tetap berlangsung, terutama dalam penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai.

Pegawai pelaksana bagian umum dan logistik Muhammad Ramdani memberikan gambaran kondisi lapangan terkait upaya perbaikan alternatif dengan menyampaikan, *“Kalau ada laptop rusak ringan, biasanya kami perbaiki sendiri dulu. Kadang bongkar dari laptop yang sudah tidak dipakai.”*

Berdasarkan dokumentasi visual yang dikumpulkan, terlihat variasi kondisi aset yang ada di KPU NTB. Sejumlah aset masih berfungsi dengan baik dan aktif digunakan, sedangkan beberapa lainnya tampak memerlukan perawatan lanjutan. Dokumentasi juga menunjukkan aktivitas pengecekan kendaraan, penataan ruangan, penggunaan sistem SIMAN V2, serta kondisi gudang yang berisi barang-barang untuk penghapusan.

b. Kendala Dalam Pengelolaan Aset

Terlihat hasil observasi di lapangan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak nyata pada hampir seluruh tahapan pengelolaan aset di KPU Provinsi NTB. Pada aspek perencanaan, peneliti mendapati banyak rencana perbaikan dan pengadaan yang harus dicoret atau ditunda karena alokasi anggaran menyusut.

Beberapa unit mencatat adanya daftar kebutuhan yang disusun namun kemudian tidak dapat direalisasikan, termasuk perbaikan AC, pengecatan kendaraan dinas, dan penggantian perangkat elektronik. Pembaruan data pada SIMAN V2 juga tampak tertunda pada beberapa bagian karena beban tugas yang menumpuk pada pegawai pelaksana. Dalam hal pengorganisasian, observasi menunjukkan keterbatasan jumlah pegawai di bagian umum dan logistik sehingga pekerjaan pendataan, pemeliharaan, dan pelaporan menumpuk pada beberapa orang. Pada pelaksanaan, kegiatan pemeliharaan tidak selalu rutin servis kendaraan atau perawatan gedung seringkali hanya dilakukan saat muncul kerusakan yang mengganggu operasional. Untuk pengawasan, pemeriksaan fisik lebih sering bersifat insidental (saat ada keluhan) daripada terjadwal karena keterbatasan waktu dan biaya operasional.

Hasil wawancara menunjukkan beberapa penyebab utama kendala tersebut. Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya menegaskan bahwa penyusunan rencana kini harus disusun berdasarkan skala prioritas anggaran tahunan *"Kita menyusun skala prioritas terkait pemeliharaan aset,"* ujarnya. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik I Gede Suantara menyatakan bahwa pemotongan anggaran membuat beberapa perencanaan tidak dapat dilaksanakan, namun ia juga menilai struktur organisasi masih memadai untuk menjalankan pengelolaan aset dengan penyesuaian. Kasubbag Umum dan Logistik Rianda Handayani menyampaikan bahwa *"pemeliharaan tetap dilakukan, tetapi beberapa perbaikan besar ditunda karena anggaran terbatas."* Dari sisi pelaksana, operator SIMAN Ika Lestari mengungkapkan kendala operasional data, khususnya pergeseran posisi aset yang tidak selalu dilaporkan oleh penanggungjawab ruang, sehingga inventarisasi menyita waktu lebih banyak *"Sering ada barang yang bergeser tanpa laporan, jadi saat inventarisasi datanya tidak cocok."* Pelaksana pemeliharaan Muhamad Ramdani juga menambahkan bahwa keterbatasan penyedia jasa yang memenuhi kriteria di wilayah Mataram menambah tantangan karena pilihan penyedia menjadi terbatas dan biaya bisa lebih tinggi.

Berdasarkan dokumentasi, tampak bukti-bukti yang menguatkan temuan observasi dan wawancara. Foto rapat kecil dan dokumen RKBMN memperlihatkan daftar kebutuhan yang diberi paraf namun kemudian dicoret. Tangkapan layar SIMAN V2 menunjukkan beberapa usulan yang berstatus ditolak atau tertunda, dan dokumen laporan semesteran memperlihatkan frekuensi pelaporan yang masih berjalan meski pengecekan lapangan berkurang. Dokumentasi gudang dan foto aset

rusak memperlihatkan sejumlah barang yang diberi label “rusak” dan dipindahkan ke area penyimpanan menunggu proses penghapusan atau pelelangan. Adapun bukti visual kerja pelaksana menunjukkan pencatatan manual (Excel) sebagai mitigasi saat input ke SIMAN V2 tertunda.

c. Solusi Menjaga Efektivitas Dan Keberlanjutan Dalam Pengelolaan Aset

Terlihat hasil observasi di lapangan bahwa KPU Provinsi NTB melakukan penyesuaian nyata pada perencanaan pengelolaan aset sejak kebijakan efisiensi anggaran diterapkan. Seluruh pegawai bagian umum dan logistik tampak lebih selektif dalam menetapkan prioritas perawatan dan pengadaan. Aktivitas pengecekan rutin masih berlangsung tetapi fokusnya diarahkan pada aset-aset yang paling mendesak dan berpengaruh langsung pada operasional, seperti kendaraan dinas, perangkat elektronik, dan fasilitas kantor utama. Pegawai pelaksana melakukan pengecekan berkala dan memberi label pada barang yang sudah tidak layak untuk diajukan penghapusan, sementara beberapa perbaikan besar ditunda sampai ada alokasi anggaran yang memungkinkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pimpinan menegaskan kombinasi langkah jangka pendek dan jangka panjang sebagai strategi utama. Sekretaris menyatakan bahwa strategi jangka pendek difokuskan pada pemeliharaan rutin dan penggunaan aset secara bijak, sedangkan strategi jangka panjang diarahkan pada penghapusan aset yang sudah menjadi beban satker. Sekretaris Mars Ansori Wijaya mengungkapkan, *“Strategi jangka pendek, pemeliharaan rutin dengan penggunaan aset yang bijak. Strategi jangka Panjang, melakukan penghapusan apabila aset menjadi beban.”* Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik I Gede Suantara menambahkan bahwa penyesuaian rencana bersifat terbatas karena rencana kerja awal tetap menjadi acuan, hanya bentuk pelaksanaan yang disesuaikan. Kasubbag Umum dan Logiatik Rianda Handayani menegaskan bahwa arahan pimpinan bersifat praktis dan langsung: menghentikan pemakaian aset yang tidak efisien dan mengarahkan perbaikan yang sifatnya preventif.

Dari sisi pelaksanaan, Pegawai menjelaskan langkah-langkah konkret yang mereka lakukan sehari-hari untuk menjaga keberlanjutan aset dengan biaya minimal. Pemeliharaan preventif rutin dilakukan, misalnya pengecekan berkala kendaraan, pembersihan dan pengecekan perangkat elektronik, serta penggantian komponen kecil. Ada praktik pragmatis seperti memanfaatkan bagian laptop yang masih

berfungsi untuk memperbaiki unit lain agar tidak segera mengusulkan pengadaan baru. Pegawai Pelaksana Muhamad Ramdani menyebutkan, *“Kalau ada laptop rusak ringan, biasanya kami perbaiki sendiri dulu, kadang ambil sparepart dari unit yang sudah tidak terpakai.”*

Hasil wawancara juga menegaskan adanya kerja sama internal dan eksternal sebagai bagian dari solusi. KPU Provinsi NTB tetap melakukan koordinasi dengan KPKNL untuk urusan penghapusan dan penilaian aset, sehingga proses administratif terkait penghapusan berjalan sesuai dengan ketentuan meskipun anggaran terbatas. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyebutkan bahwa kolaborasi ini penting untuk menjaga kepatuhan prosedural sekaligus mengurangi beban aset yang tidak produktif. Di internal, pembagian tugas diatur agar SDM yang terbatas dapat bekerja lebih fokus, misalnya driver fokus pada transportasi, sedangkan pelaksana fokus pada pemeliharaan dan pencatatan.

Berdasarkan dokumentasi yang dikumpulkan, SIMAN V2 digunakan secara intensif sebagai basis data untuk menilai kondisi aset dan menentukan prioritas tindakan. Tampilan layar SIMAN V2 yang dipakai pegawai operator memperlihatkan catatan pemeliharaan, riwayat usulan, dan status usulan RKBMN. Data tersebut menjadi rujukan saat memutuskan apakah aset perlu dirawat, ditunda perbaikannya, atau diusulkan penghapusan. Dokumentasi foto juga memperlihatkan rapat evaluasi berkala (bulanan/semesteran) yang menjadi momen tindak lanjut atas temuan lapangan.

2. Pembahasan

a. Strategi Dalam Mengelola Aset

Strategi pengelolaan aset di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat terbentuk melalui proses yang cukup panjang dan terstruktur, mulai dari pendataan, koordinasi, pelaksanaan teknis, hingga pengawasan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, meskipun KPU NTB sedang berada dalam kondisi efisiensi anggaran, mekanisme pengelolaan aset tetap berjalan tertib dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Handayani & Laksana, 2024) yang menekankan bahwa pengelolaan aset pemerintah perlu diawali dengan pendataan yang akurat, digitalisasi informasi, serta pemeliharaan yang dilakukan secara terencana.

Pada tahap perencanaan, proses selalu dimulai dengan pendataan aset oleh para pelaksana. Mereka melakukan pengecekan fisik, mencatat perubahan kondisi,

mendokumentasikan melalui foto, kemudian memperbarui data tersebut ke dalam SIMAN V2. Pendataan ini tidak hanya sebagai formalitas, tetapi menjadi dasar dalam penyusunan RKBMN. Setelah data terkumpul, pelaksana menyerahkannya kepada Kasubbag untuk diverifikasi, lalu dibahas bersama Kabag dan Sekretaris dalam rapat kecil yang rutin dilakukan. Proses ini sejalan dengan (Priyono, 2020) yang menegaskan bahwa inventarisasi yang akurat merupakan fondasi dalam penyusunan rencana kebutuhan aset yang realistis.

Penyusunan RKBMN sendiri dilakukan dua tahun sebelum periode anggaran berjalan. Namun, akibat kebijakan efisiensi anggaran, KPU NTB harus melakukan penyaringan terhadap kebutuhan yang diusulkan. Beberapa pengajuan seperti kendaraan dinas, sewa kendaraan operasional, dan pengadaan sarana prasarana mengalami penundaan sehingga hanya kebutuhan yang benar-benar mendesak yang diprioritaskan. Kondisi ini sesuai dengan kajian (Zacky et al., 2025) yang menjelaskan bahwa efisiensi anggaran mengharuskan instansi pemerintah menyesuaikan prioritas agar operasional tetap berjalan meskipun anggaran terbatas. Dalam proses ini, SIMAN V2 berperan penting karena dapat menunjukkan nilai penyusutan aset, riwayat pengajuan sebelumnya, hingga status usulan yang sedang diproses. Bahkan ditemukan kasus usulan pembangunan gedung yang terhambat karena lahan hibah berada di zona hijau, menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya bergantung pada kebutuhan, tetapi juga dibatasi oleh regulasi dan data administratif yang tercatat dalam sistem, sebagaimana dijelaskan oleh (Cahyaningrum & Sambharakreshna, 2024)

Pada aspek pengorganisasian, pembagian tugas di KPU NTB sudah berjalan tertata. Sekretaris berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB), Kasubbag bertanggung jawab secara teknis, sementara para pelaksana dibagi sesuai bidang kerja, mulai dari pengelolaan SIMAN, pencatatan manual, hingga pengecekan fisik dan pemeliharaan aset. Struktur ini mempermudah koordinasi antara bagian umum, logistik, dan keuangan. Setiap kebutuhan, baik pengadaan maupun pemeliharaan, mengikuti jalur yang sama mulai dari pelaksana, Kasubbag, Kabag, hingga Sekretaris. Model koordinasi semacam ini memperkuat efektivitas pengelolaan aset dan sejalan dengan konsep pengorganisasian aset pemerintah menurut (Handayani & Laksana, 2024) serta temuan (Rudhistiar et al., 2023) terkait sistem pengelolaan aset di KPU NTB.

Pada tahap pelaksanaan, para pelaksana tidak hanya mengerjakan pendataan aset tetapi juga memastikan perubahan informasi selalu diperbarui di SIMAN V2. Pencatatan manual tetap dilakukan sebagai cadangan untuk menghindari kehilangan data. Dalam kondisi anggaran yang efisien, KPU NTB menerapkan berbagai langkah penghematan internal, seperti pengaturan penggunaan AC, pengendalian lampu, dan pengurangan kegiatan yang tidak mendesak. Langkah ini sejalan dengan hasil penelitian (Zacky et al., 2025) yang menyebutkan bahwa strategi penghematan internal menjadi upaya efektif bagi organisasi untuk tetap menjaga kelangsungan operasional di tengah keterbatasan anggaran. Selain itu, pelaksana juga rutin memonitor penyusutan aset dan riwayat usulan melalui SIMAN V2, sebagaimana dikemukakan (Priyono, 2020) bahwa sistem digital dapat menyajikan informasi aset secara lebih transparan dan akurat.

Tahap pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan fisik langsung dan penyusunan laporan berkala. Pelaksana memeriksa kondisi gedung, kendaraan, serta perangkat elektronik yang digunakan sehari-hari. Mereka juga menyusun laporan bulanan kepada Kabag dan laporan semester sesuai ketentuan BMN. Sekretaris dan Kabag kemudian memberikan arahan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan tersebut. Mekanisme umpan balik ini mencerminkan prinsip peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pengelolaan aset, sebagaimana dijelaskan oleh (Zacky et al., 2025) bahwa evaluasi berlapis diperlukan agar aset tetap terpelihara dan tidak menimbulkan beban baru bagi institusi.

Secara keseluruhan strategi pengelolaan aset di KPU NTB berjalan cukup efektif meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. KPU NTB mampu menjaga keberlanjutan fungsi aset melalui perencanaan berbasis data, digitalisasi SIMAN V2, penyusunan prioritas, struktur kerja yang jelas, pemeliharaan rutin, langkah penghematan, dan pengawasan berkelanjutan. Kombinasi langkah tersebut membuat operasional tetap berjalan meskipun berada dalam tekanan anggaran.

b. Kendala Dalam Pengelolaan Aset

Dalam praktik pengelolaan aset, setiap instansi tentu menghadapi situasi yang tidak selalu ideal, terlebih ketika dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Hal serupa dialami oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana pengelolaan aset harus tetap berjalan meskipun berada dalam kondisi efisiensi anggaran.

Kendala-kendala yang muncul dapat terlihat melalui hasil observasi lapangan dan wawancara dengan para informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset. Dari proses tersebut tampak bahwa kebijakan efisiensi anggaran membawa tantangan di hampir seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, hingga pengawasan. Situasi ini sejalan dengan (Mallongi, 2025) yang menjelaskan bahwa efisiensi anggaran memang penting bagi stabilitas fiskal, tetapi dalam praktiknya sering menimbulkan dilema operasional yang harus dikelola dengan strategi yang tepat.

Pada tahapan perencanaan, kendala paling menonjol adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan riil aset dengan pagu anggaran yang semakin terbatas. Sekretaris KPU menyampaikan bahwa penyusunan rencana harus benar-benar mengikuti alokasi anggaran yang tersedia, sehingga tidak semua kebutuhan dapat diakomodasi. Hal ini diperkuat oleh Kepala Subbagian Umum dan Logistik, yang menjelaskan bahwa meskipun kebutuhan aset cukup besar, prioritas tetap harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Akibatnya, sejumlah program, termasuk rencana peremajaan aset, terpaksa ditunda. Kondisi ini selaras dengan temuan (Yuliati, 2025) yang menyebutkan bahwa efisiensi anggaran di NTB sering berdampak pada terbatasnya anggaran operasional serta keterlambatan pemenuhan kebutuhan aset.

Dari sisi pengorganisasian, struktur organisasi sebenarnya sudah berjalan baik, namun hambatan terlihat pada tingkat pelaksana. Jumlah SDM yang bertanggung jawab atas pencatatan, perawatan, dan input data aset masih belum sebanding dengan jumlah aset yang harus dikelola. Kekurangan tenaga ini menyebabkan beban kerja meningkat, terutama ketika beberapa kegiatan berlangsung bersamaan. Selain itu, koordinasi antarbagian menjadi lebih sulit ketika terjadi penyesuaian anggaran di tengah tahun yang mengharuskan perubahan prioritas. Hal tersebut sejalan dengan kajian (Suherman et al., 2025) yang menyatakan bahwa keterbatasan SDM merupakan salah satu dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, sehingga diperlukan strategi penyesuaian yang tepat.

Pada tahap pelaksanaan, kendala terbesar muncul pada kondisi aset yang sudah tidak layak pakai namun masih harus digunakan karena belum tersedia anggaran untuk peremajaan. Beberapa aset yang berusia tua seperti kendaraan operasional, peralatan elektronik, dan sarana kantor lainnya sering membutuhkan perbaikan besar, tetapi efisiensi anggaran membuat perbaikan hanya dapat dilakukan

secara minimal. Pegawai pelaksana menjelaskan bahwa mereka melakukan pemeliharaan seadanya agar aset tetap dapat digunakan. Bahkan, untuk kendaraan operasional, perbaikan besar seperti penggantian harus diganti dengan pemolesan sederhana karena keterbatasan biaya. Temuan ini sejalan dengan (Handayani & Laksana, 2024) yang menyarankan pentingnya pemeliharaan preventif dan pemanfaatan teknologi sebagai upaya mempertahankan kualitas aset di tengah keterbatasan.

Kendala berikutnya berkaitan dengan penyedia barang dan jasa. Dalam proses pemeliharaan, KPU NTB wajib mengikuti regulasi pengadaan yang mengutamakan penyedia berstatus PKP. Namun di wilayah Mataram, jumlah penyedia yang memenuhi kriteria cukup terbatas, sehingga proses pemeliharaan dan perbaikan sering mengalami keterlambatan atau membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Tidak tersedianya opsi penyedia UMKM mempersempit alternatif yang dapat dipilih. Kondisi ini sesuai dengan pendapat (Fatoni, 2024) yang menegaskan bahwa keterbatasan regulasi dan pilihan penyedia dapat menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan aset pemerintah.

Dalam pengelolaan data aset, kendala ditemukan pada penggunaan SIMAN V2. Operator menyampaikan bahwa pergeseran barang atau perubahan posisi aset di lapangan sering kali tidak dilaporkan oleh masing-masing subbagian, sehingga data di sistem tidak selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Gangguan teknis pada SIMAN V2 juga tidak dapat ditangani secara mandiri karena sistem dikelola DJKN, sehingga pekerjaan dapat tertunda. Hal ini sejalan dengan penelitian (Priyono, 2020; Sembiring & Fitriati, 2025) yang menekankan pentingnya kualitas data awal dan tantangan teknis dalam penggunaan sistem manajemen aset berbasis digital.

Pada tahap pengawasan dan evaluasi, keterbatasan anggaran operasional membuat kegiatan pemeriksaan rutin tidak dapat dilakukan secara optimal. Meskipun secara prosedural tetap berjalan, pelaksana merasakan bahwa pemeriksaan harus dilakukan bersamaan dengan tugas lainnya, sehingga waktu yang dialokasikan menjadi lebih sedikit. Selain itu, tindak lanjut terhadap temuan baik dari BPK maupun evaluasi internal sering mengalami keterlambatan. Temuan ini sesuai dengan (Zacky et al., 2025) yang menekankan pentingnya pengawasan berlapis dan strategi adaptif agar akuntabilitas tetap terjaga ketika sumber daya terbatas.

Tidak hanya berdampak pada teknis dan administrasi, efisiensi anggaran juga memengaruhi dinamika kerja dan psikologis pegawai. Beberapa pegawai menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran membuat pekerjaan menjadi lebih berat, terutama ketika harus memaksimalkan aset yang kondisinya sudah kurang layak. Meski demikian, semangat kerja tetap terjaga karena pegawai memahami bahwa efisiensi anggaran merupakan kebijakan nasional yang harus dipatuhi. Hal ini sejalan dengan (Darmawan et al., 2025) yang menegaskan bahwa efisiensi anggaran perlu dijalankan secara bijak agar kualitas pelayanan dan prinsip Good Governance tetap terjaga.

Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran menimbulkan serangkaian kendala yang saling terkait dalam pengelolaan aset di KPU NTB. Keterbatasan anggaran membuat banyak kebutuhan aset tertunda, kekurangan SDM pelaksana menyebabkan sejumlah pekerjaan terhambat, dan kendala teknis pada SIMAN V2 menambah beban dalam pengelolaan data. Pengawasan pun tidak dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan biaya dan waktu. Semua kendala ini mendorong KPU NTB untuk terus menyesuaikan strategi mereka agar pengelolaan aset tetap efektif dan akuntabel, sejalan dengan kajian pustaka yang menekankan pentingnya strategi adaptif, digitalisasi informasi, serta optimalisasi SDM di tengah keterbatasan sumber daya.

c. Solusi Menjaga Efektivitas Dan Keberlanjutan Dalam Pengelolaan Aset

Upaya menjaga efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan aset di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi semakin penting seiring diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, KPU NTB berusaha memastikan seluruh aset tetap berfungsi optimal sehingga kegiatan operasional lembaga dapat berjalan tanpa hambatan. Untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan, peneliti meninjau proses pengelolaan aset melalui empat aspek manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan seluruh informan kunci, terlihat bahwa pengelolaan aset dilakukan melalui serangkaian strategi yang terstruktur, menyeluruh, dan adaptif. Setiap tahapan saling terhubung dan berfokus pada efektivitas penggunaan aset serta keberlanjutan operasional KPU NTB.

Pada tahap perencanaan, KPU NTB menerapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang saling melengkapi. Strategi jangka pendek diarahkan pada pemeliharaan rutin dan pemanfaatan aset secara bijak untuk mendukung kebutuhan operasional harian. Sementara itu, strategi jangka panjang lebih menekankan pada penghapusan aset yang sudah tidak layak agar tidak menjadi beban satuan kerja. Dengan cara ini, alokasi anggaran dapat difokuskan pada aset yang masih produktif dan mendukung tugas kelembagaan. Sekretaris KPU menjelaskan bahwa rencana kerja tetap dijalankan sesuai ketentuan, namun beberapa bentuk kegiatan dapat disesuaikan agar sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran. Prioritas diberikan pada aset yang sangat penting bagi operasional, seperti gedung kantor, kendaraan dinas, perangkat elektronik, dan perlengkapan utama lainnya. Pemanfaatan sistem digital SIMAN V2 juga dimaksimalkan untuk memastikan inventarisasi aset tetap akurat. Input berkala dan inventarisasi tahunan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait pemeliharaan, penghapusan, maupun pengadaan aset. Pendekatan ini sejalan dengan (Handayani & Laksana, 2024) yang menekankan pentingnya pemeliharaan preventif dan digitalisasi data aset dalam mendukung efisiensi anggaran, serta (Priyono, 2020) yang menyoroti akurasi data sebagai kunci pengelolaan aset yang efektif.

Pada tahap pengorganisasian, fokus diarahkan pada optimalisasi struktur organisasi serta penguatan koordinasi dengan pihak eksternal. Wawancara dengan Sekretaris KPU dan Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menunjukkan bahwa kerja sama dengan KPKNL tetap dilakukan secara rutin, terutama terkait penghapusan dan penilaian aset. Struktur internal tidak mengalami perubahan besar, namun pembagian tugas dioptimalkan agar sumber daya manusia yang terbatas dapat bekerja lebih efektif. Contohnya, driver diarahkan untuk fokus menangani transportasi, sementara pegawai lainnya mengurus pemeliharaan, pendataan, dan inventarisasi aset. Arahan teknis juga diberikan secara berkala untuk memastikan seluruh pegawai memahami prosedur penggunaan aset yang benar. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Fatoni, 2024) yang menekankan bahwa keterbatasan SDM dapat diatasi melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi tim yang baik.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, berbagai langkah nyata diterapkan untuk menjaga keberlanjutan aset tanpa menambah beban anggaran. Pemeliharaan preventif dilakukan secara berkala, seperti pengecekan kendaraan, perangkat elektronik, dan sarana kantor, guna mencegah kerusakan besar yang memerlukan biaya tinggi. Aset

dimanfaatkan secara efisien, termasuk pengaturan penggunaan listrik dan fasilitas lain untuk menghindari pemborosan. Inovasi sederhana juga diterapkan, misalnya memanfaatkan komponen dari laptop yang masih berfungsi untuk memperbaiki perangkat lain. Koordinasi antarpegawai berjalan baik, didukung arahan langsung dari Sekretaris dan Kabag dalam menentukan prioritas perbaikan atau penghapusan aset. Hal ini sejalan dengan temuan (Rudhistiar et al., 2023) yang menyebutkan bahwa inventarisasi berbasis website mendukung efisiensi administrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Tahap pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh strategi berjalan efektif. Evaluasi dilakukan secara rutin melalui rapat bulanan dan semesteran, serta pemantauan langsung di lapangan. Pengawasan melekat dilakukan oleh Sekretaris dan Kabag untuk memastikan setiap langkah sesuai kebijakan. Hasil evaluasi kemudian ditindaklanjuti oleh Kasubbag dan Kabag, misalnya melalui perbaikan ringan atau penundaan penghapusan jika kondisi belum memungkinkan. Data pada SIMAN V2 menjadi acuan utama dalam menilai kondisi aset dan menentukan langkah berikutnya. Walaupun beberapa temuan tidak dapat segera ditindaklanjuti terutama aset yang rusak berat sejak lama sistem evaluasi ini tetap memberi kontrol efektif dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan aset. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Cahyaningrum & Sambharakreshna, 2024; Sembiring & Fitriati, 2025) yang menunjukkan bahwa tata kelola digital berbasis web mampu meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan aset publik.

Selain aspek teknis, strategi KPU NTB juga mencakup aspek psikologis dan kinerja pegawai. Meskipun bekerja dalam situasi anggaran yang terbatas, pegawai tetap menunjukkan motivasi yang baik karena memahami bahwa efisiensi merupakan kebijakan nasional yang wajib dijalankan. Komunikasi yang efektif, koordinasi antarpegawai, serta keterlibatan pimpinan secara langsung turut membantu menjaga stabilitas kinerja tim. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance sebagaimana dijelaskan (Darmawan et al., 2025), bahwa efisiensi harus berjalan seiring dengan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, solusi yang diterapkan KPU NTB menunjukkan pendekatan manajemen yang adaptif dan responsif terhadap kondisi efisiensi anggaran. Strategi yang dilakukan mulai dari perencanaan yang selektif, pengorganisasian yang optimal, pelaksanaan yang efisien, hingga pengawasan

berbasis data telah membantu menjaga keberlanjutan aset sekaligus memastikan operasional lembaga tetap berjalan efektif. Pendekatan ini dapat menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan aset publik pada era anggaran yang semakin ketat, di mana setiap keputusan harus mempertimbangkan manfaat, biaya, dan keberlanjutan operasional.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset di KPU Provinsi NTB tetap berjalan dengan cukup baik meskipun harus beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran. Melalui perencanaan berbasis data, pemanfaatan SIMAN V2, serta koordinasi yang tertata mulai dari pelaksana hingga pimpinan, KPU NTB mampu mempertahankan fungsi aset agar tetap mendukung operasional lembaga. Berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, jumlah SDM yang belum memadai, kondisi aset yang banyak membutuhkan perbaikan, serta hambatan teknis pada sistem, memang menjadi tantangan yang dirasakan langsung oleh para pegawai di lapangan. Namun, dengan langkah-langkah adaptif seperti pemeliharaan rutin, penentuan prioritas aset yang benar-benar mendesak, kerja sama dengan KPKNL, serta evaluasi berkala, institusi ini dapat terus menjaga efektivitas dan keberlanjutan aset yang dimiliki. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan menunjukkan bahwa KPU NTB mampu menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran yang terbatas tanpa mengurangi kualitas layanan dan akuntabilitas pengelolaan aset, sehingga tetap sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Daftar Pustaka

- Benny Eko, S. (2024). *Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Mengurangi Pemborosan dan Meningkatkan Hasil*. DJKN Kemenkeu. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3686-efisiensi-pengelolaan-anggara-mengurangi-pemborosan-dan-meningkatkan-hasil>
- Cahyaningrum, Y., & Sambharakreshna, Y. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Aset Berbasis Web Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Keberlanjutan. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 7(2), 473–484. <https://doi.org/10.31539/intecom.v7i2.9864>
- Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.88>
- Fatoni, M. (2024). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Aset Dan Pemeliharaan Aset Daerah. *Jornal Politics And Government*, 1(2), 171–178.
- Handayani, P., & Laksana, A. (2024). Strategi Efisiensi Pemeliharaan Aset Publik di Sektor Pemerintah. *Journal Politics and Government*, 1(2), 222–231.

- <https://ejournal.lppmbinabangsa.ac.id/index.php/jpg/article/view/110>
- Hidayat, D. A. (2024). *Implementasi Aplikasi SIMAN Versi 2 dalam Pengelolaan BMN*. DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-artikel/17236/Implementasi-Aplikasi-SIMAN-Versi-2-dalam-Pengelolaan-BMN>.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun, 1 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>
- Jelita Silvia Hutabarat, Junita Mawartina, Dewi Yanti, & W Pangestoeti. (2025). Peluang dan Tantangan dalam Efisiensi Anggaran Negara pada Transformasi Digital Pelayanan Publik. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 28–40. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.752>
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Menteri Keuangan*, 040501, 1–66.
- Kuswarak, K., Nuzleha, N., & Zulfikar, I. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Sumber Air Mesuji Sekampung Dilampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 6(2), 45–56. <https://doi.org/10.24967/jmms.v6i1.1674>
- Mallongi, A. A. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasaah Maliyyah. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), 212–226.
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Hitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA*, 9(2), 982–992.
- Nurchahyo, R., & Nurdini, A. (2024). *Manajemen Pemeliharaan Preventive* (Issue July).
- Pramana, A. H. B. (2024). *Jaga Aset Negara: Aplikasi SIMAN Versi 2 sebagai Pengembangan Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara*. DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura/baca-artikel/17430/Jaga-Aset-Negara-Aplikasi-SIMAN-Versi-2-sebagai-Pengembangan-Sistem-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara>
- Priyono, A. (2020). Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran. *Jurnal Manajemen Publik*, 12(3), 45–60.
- Rudhistiar, D., Menando, A., Prio Utomo, Y., & Habib A, P. (2023). Implementasi Inventaris Aset Barang Berbasis Website di Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB. *Prosiding SENIATI*, 7(1), 55–62. <https://doi.org/10.36040/seniati.v7i1.7873>
- Saputri, S., Qatimah, H., Fernando, R., & Widianita, R. (2025). Penerapan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia dalam Prespektif Prinsip Ekonomi Islam. *Journal of Fiscal and Monemetary Studies*, 1(2), 1–18.
- Sembiring, E. B., & Fitriati, R. (2025). *Digital Governance Of Asset Management , A Study Of The Planning Bureau At The Indonesian Attorney General ' s Office Tata Kelola Digital Manajemen Aset , Studi Pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI era pemerintahan modern , seiring dengan tuntutan aku*. 6(4), 5511–5523.
- Setyawan, I., Bakhtiar, A., & Korespondensi, P. (2025). Pemilihan Strategi Pemeliharaan Preventive Maintenance Excavator Menggunakan Pendekatan Analyttical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus: CV Chandradimuka Makmur Perkasa). *Industrial Engineering Online Journal*, 14(3), 1–7.
- Sugiyono. (2022). Metode Penulisan Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274.
- Suherman, Kurniawan, T. L., & Syaifullah. (2025). Kebijakan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan Transparansi Dan Akuntabilitas. *Unizar Law Review*, 8(1), 2798–4109.

<https://ulr.unizar.ac.id/ulr/index>

- Yuliati, D. (2025). Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di Bappeda Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 32-42.
<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/206>
- Zacky, A., Dame, A., Wulandari, E., & Wardani, W. E. (2025). *Strategi Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Jember Dalam Meraih Opini WTP (Dari Disclaimer Hingga WTP Berturut-Turut) Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 587-593.